

Studi Hubungan Ruralisasi Dengan Penduduk Lokal: Pola Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Daerah Pinggiran Jakarta

M Ridwan Lubis

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (*ridwan.lubis@uinjkt.ac.id*)

Bambang Irawan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (*bambang.irawan@uinjkt.ac.id*)

Amirsyah Tambunan

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (*amirsyahtambunan@yahoo.com*)

Abstract: *There are four types patterns of shifting population due to the influence of modernity, namely ruralization, urbanization, transmigration and circulation. Ruralization is the movement from city to village while urbanization is moving from village to city. Migration is a permanent migration of people from one area to another. Finally, circulation is the movement of people to fulfill certain interests such as work and living in two different places, so they must move every day from village to city. This research focuses on the Study of the Relationship between Ruralization and Local Residents: The Pattern of Religious Harmony in the Suburbs of Jakarta. The overflow of Jakarta's population is accommodated by new growth areas which are then concluded to be Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. The occurrence of this displacement is due to a push factor from the area of origin, a pull factor from the destination. Attractor factor is the hope of getting opportunity to improve their standard of living and religious, political, and ethnic considerations in the area of origin. Eventhough religion is another factor but residents of villages as rural targets have religious affinity that is inherent in religious identity with ethnic groups, especially Betawi ethnic groups as local residents with migrants residents. Religious factors as a basis for determining the work ethic of social cohesiveness in this case religious harmony. Therefore, a strategy is needed to build social cohesiveness due to culture and diversity to avoid social tensions.*

Keywords: *ruralization, competition, integration, religious harmony.*

Abstrak: *Ada empat jenis pola pergeseran populasi karena pengaruh modernitas, yaitu ruralisasi, urbanisasi, transmigrasi dan sirkulasi. Ruralisasi adalah perpindahan dari kota ke desa sementara urbanisasi bergerak dari desa ke kota. Migrasi adalah migrasi permanen orang dari satu area ke area lain. Akhirnya, sirkulasi adalah pergerakan orang untuk memenuhi minat tertentu seperti bekerja dan tinggal di dua tempat yang berbeda, sehingga mereka harus pindah setiap hari dari desa ke kota. Penelitian ini berfokus pada Studi Hubungan antara Rasionalisasi dan Penduduk Lokal: Pola Kerukunan Umat Beragama di Pinggiran Kota Jakarta. Luapan penduduk Jakarta diakomodasi oleh daerah-daerah pertumbuhan baru yang kemudian disimpulkan sebagai Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Terjadinya perpindahan ini disebabkan oleh faktor pendorong dari daerah asal, faktor penarik dari tujuan. Faktor penarik adalah harapan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan standar hidup dan pertimbangan agama, politik, dan etnis mereka di daerah asal. Walaupun agama adalah faktor lain tetapi penduduk desa sebagai sasaran pedesaan memiliki kedekatan agama yang melekat dalam identitas agama dengan kelompok etnis, terutama kelompok etnis Betawi sebagai penduduk lokal dengan penduduk pendatang. Faktor agama sebagai dasar penentuan etos kerja kekompakan sosial dalam hal ini kerukunan beragama. Oleh karena itu, diperlukan strategi untuk membangun kekompakan sosial karena budaya dan keragaman untuk menghindari ketegangan sosial.*

Kata kunci: *ruralisasi, kompetisi, integrasi, kerukunan umat beragama.*

Pendahuluan

Pertumbuhan kota besar tidak hanya berdampak pada terjadinya penambahan jumlah populasi akan tetapi diiringi pula oleh perubahan pola relasi sosial yang kemudian berimbas kepada perdesaan. Masyarakat perdesaan semula hidup dalam suasana guyub dengan pola relasi sosial solidaritas mekanistik kemudian terdesak akibat ruralisasi dengan pola relasi sosial solidaritas organik. Terjadinya perubahan sosial ini tidak bisa dihindari akan terjadinya perubahan budaya. Masyarakat yang semula selalu memandang orang lain dengan sikap yang positif akan tetapi seiring dengan perkembangan informasi, masyarakat mulai menaruh curiga terhadap para pendatang termasuk warga perkotaan yang melakukan ruralisasi ke perdesaan. Terjadinya ruralisasi pada dasarnya dapat dilihat pada terjadinya interaksi dua atau lebih jenis masyarakat. Jenis masyarakat menurut Doob, dapat dibagi ke dalam masyarakat berburu dan memulung, masyarakat berkelompok-kelompok, hortikultura, pertanian dan industri.¹ Sedang tipologi masyarakat yang berada di lokasi penelitian adalah masyarakat petani dan industri. Dengan demikian dilihat dari jenis profesi maupun sumber penghidupan, kelompok ruralisasi sebagai pendatang dan penduduk lokal sebagai pemukim lama memiliki sejumlah perbedaan kultur. Oleh karena itu, selayaknya masyarakat yang berbeda kultur ini didorong agar menuju kepada proses integrasi yang dirancang secara sistematis. Hal ini tentu merupakan agenda penting yang perlu dibagi perhatian oleh pemerintah ketika menyusun perencanaan pembangunan. Hak untuk memilih tempat

tinggal serta berpindah adalah merupakan bagian dari hak asasi setiap warga masyarakat. Karena itu, terjadinya perpindahan adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari apalagi hal tersebut memperoleh jaminan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) yang berbunyi:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.²

Kehidupan di kota besar ditandai terjadinya mobilitas penduduk yang demikian kentara yang berakibat mudahnya terjadi gesekan sosial. Pola relasi itu melahirkan dua kemungkinan yaitu konflik dan integrasi. Hal itu disebabkan karena pertemuan antara dua atau lebih budaya yang berbeda tidak diikuti oleh rekayasa pihak Pemerintah maupun pemuka masyarakat yang dapat memanipulasi kerenggangan masyarakat multikultural agar berubah menjadi solidaritas sosial. Hal itu disebabkan karena pada satu sisi masyarakat perdesaan semula diikat oleh solidaritas mekanik namun setelah terjadi mobilitas para pendatang perkotaan ke perdesaan yang diikat oleh solidaritas organik, masyarakat perdesaan menjadi kebingungan akibat terjadinya tumpang tindih antara solidaritas mekanik di perdesaan dengan solidaritas organik masyarakat perkotaan. Sekalipun terdapat faktor pembeda di masyarakat yaitu diferensiasi dan stratifikasi, akan tetapi begitu mereka kembali ke wilayah habitatnya sebagai

¹ Christopher Bates Dobb, *The Sociology: An Introduction*, (New York, CBS Colleg, 1985), 168-170.

² Badan Litbang Dan Diklat, Kemenag RI, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-*

undangan Kerukunan Umat Beragama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (Jakarta: Balitbang Diklat, Kemenag RI, 2012), 120

orang desa maka ikatan solidaritas terjalin kembali.

Seiring dengan terjadinya pertumbuhan grafik pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur seperti pembangunan sarana perhubungan maka akan berdampak terhadap terjadinya intensifikasi mobilitas sosial penduduk dari perkotaan ke kawasan pinggiran perkotaan atau perdesaan. Mobilitas sosial ini biasanya akan melahirkan dua kemungkinan yaitu tetap terpeliharanya integrasi sosial akibat kemampuan memanipulasi perubahan menjadi daya kohesi sosial atau sebaliknya heterogenitas masyarakat khususnya dalam konfigurasi umat beragama akan semakin kentara sehingga mudah terjadi konflik di antara masyarakat. Hal itu disebabkan karena fungsi agama telah berkembang tidak lagi sekedar dipahami sebagai sumber makna (*The ground of meaning*) akan tetapi telah berkembang menjadi agama sebagai sub sistem sosial. Dengan demikian, sub sistem agama dapat saling mempengaruhi sub sistem sosial lainnya seperti politik, ekonomi, pendidikan, hukum dan lain sebagainya. Hal itu disebabkan karena cara berpikir masyarakat tidak lagi murni sebagai orang desa akan tetapi telah berkembang menjadi masyarakat tepian kota (*sub urban society*). Ditambah lagi dengan peran media informasi yang telah merambah berbagai tingkatan dan jenis kelompok masyarakat. Menurut Bintarto, kota dapat diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan manusia ditandai dengan strata sosial ekonomi heterogen dan coraknya materialistis. Ciri-ciri masyarakat kota; hubungan dengan masyarakat lain dilakukan secara terbuka dan saling mempengaruhi, kepercayaan kuat akan ilmu pengetahuan teknologi, masyarakatnya tergolong ke berbagai profesi, tingkat pendidikan pada

umumnya tinggi, hukum yang berlaku adalah hukum tertulis dan bersifat kompleks, adanya gedung-gedung yang menjulang tinggi, kemacetan, kesibukan warga masyarakatnya, sikapnya cenderung individual. Atas dasar pola kehidupan yang demikian, maka tentu saja kehidupan di perkotaan yang kemudian ditularkan kepada masyarakat perdesaan akan rentan menimbulkan konflik.

Konflik sosial bisa terjadi akibat perbedaan latar belakang budaya, agama dan sebagainya. Hal itu disebabkan karena agama dan budaya adalah dua hal yang menjadi sumber referensi masyarakat ketika akan melakukan suatu penilaian terhadap setiap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat. Pola pembangunan baik nasional maupun daerah selama ini masih lebih mengutamakan aspek-aspek yang bersifat meteril dengan harapan apabila aspek materiil ini terselesaikan maka akan membawa dampak luncuran bola salju kepada kehidupan spiritual masyarakat (*snowball effect*). Dalam pada itu, antisipasi dari pihak pemerintah masih kurang mempersiapkan dampak dari keberhasilan pembangunan infrastruktur itu. Sehingga tidak bisa dihindari adanya kesenjangan hubungan antara masyarakat pendatang dengan masyarakat pemukim lokal yang ditandai dengan munculnya pemukiman eksklusif dalam bentuk kompleks perumahan yang dibatasi secara fisik dengan pemukim lama. Hal ini tentu saja menjadi lahan yang subur kemungkinan peluang terjadinya konflik antara dua kelompok masyarakat yang memiliki peta budaya dan profesi yang berbeda.

Berbagai kasus konflik di kalangan umat beragama akan semakin mendorong kepada kesenjangan hubungan antar kelompok umat beragama. Hal itu disebabkan munculnya sikap *labeling* di antara kelompok sosial yang

berbentuk stereotip, prasangka dan stigma. Tiga bentuk *labeling* di atas, apabila tidak dilakukan netralisasi maka akan berakibat pada munculnya diskriminasi sosial baik oleh pemukim lama terhadap pemukim baru maupun pemukim baru terhadap pemukim lama. Konflik berlatar agama merupakan peringatan terhadap kelangsungan Indonesia sebagai sebuah bangsa. Hal itu disebabkan karena di dalam setiap agama tersimpan sikap emosional yang sangat kuat akibat dari klaim masing-masing umat beragama terhadap kebenaran (*truth claim*) dan keselamatan (*salvation claim*) ajaran agamanya. Selama ini, adanya perubahan konfigurasi kependudukan antara perkotaan dengan pedesaan dianggap sebagai sesuatu yang terjadi dengan sendirinya (*taken for granted*) sehingga dirasa tidak perlu dilakukan rekayasa sebagai panduan penataan struktur kependudukan. Seseorang berpindah oleh karena adanya faktor pendorong (*push factor*), penarik (*pull factor*) dan faktor-faktor lainnya (*others factor*). Sebaliknya bagi orang desa, wilayah pemukiman mereka telah dipahami sebagai warisan yang mereka terima secara turun temurun dari leluhurnya oleh karena itu mereka merasa berkewajiban untuk memelihara kemurnian dari warisan itu. Kedatangan nilai-nilai atau gagasan yang baru berhadapan dengan komitmen untuk memelihara tradisi yang diwarisi turun temurun tentu menjadi titik masuk (*entry point*)

Beragama adalah hak individu yang tidak bisa diintervensi oleh negara. Beragama memiliki dua sisi yaitu internum dan eksternum. Secara internum, beragama dimaksudkan sebagai keyakinan pribadi yang dianut oleh seseorang dan tidak berkaitan dengan keyakinan yang dianut orang lain. Oleh karena itu, sisi internum agama adalah hak absolut dari setiap orang dan oleh karena itu

hanya dia yang mempertanggungjawabkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan dari keyakinan yang dianut sepanjang keberagamaannya itu bersifat personal. Selanjutnya sisi eksternum adalah bagian dari keberagamaannya yang bersinggungan dengan hak yang sama yang juga dimiliki orang lain. Sisi kebebasan eksternum sangat rentan berurusan dengan kebebasan yang juga dimiliki orang lain. Oleh karena itu, sisi eksternum ini dibutuhkan adanya kesepakatan terhadap rambu-rambu kebebasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban bersama. Karena terganggunya ketenteraman dan ketertiban bersama akan berpeluang membuka ruang konflik di antara warga masyarakat yang sejak awal sudah menyimpan potensi konflik. Demikianlah halnya ketika beragama telah menjadi bagian dari sub sistem sosial. Artinya, beragama tidak lagi sifatnya personal akan tetapi telah meningkat menjadi kontekstualisasi budaya sehingga melahirkan berbagai kesepakatan maupun perbedaan. Dalam pada itulah, agama menjadi terkait interaksi dengan berbagai sub sistem lainnya seperti ekonomi, politik, hukum, budaya dan sebagainya baik yang sifatnya positif maupun negatif.

Sebagai contoh, faktor politik akan bisa mempengaruhi agama. Pada mulanya politik adalah urusan persaingan di antara masyarakat yang memperebutkan kekuasaan atau dominasi antara satu kelompok terhadap kelompok yang lain termasuk agama. Begitu politik memasuki wilayah agama maka sikap yang muncul dari masyarakat adalah mengabsolutkan berdasarkan term-term agama yang dianutnya terhadap keberadaan suatu aliran politik dan menegasikan keberadaan kelompok lainnya. Ketika sikap saling mengabsolutkan itu memasuki wilayah politik maka nilai politik sebagai sebuah seni

kemungkinan memiliki kekuasaan berubah menjadi memutlakkan kelompok yang satu dan meniadakan hak hidup kelompok yang lain. Terminologi agama yang digunakan untuk saling memperkuat argumentasinya akan merenggangkan jaringan hubungan masyarakat padahal mereka adalah terdiri dari komunitas yang bertetangga. Demikian juga manakala terjadi sebaliknya yaitu kelompok agama atau aliran keagamaan menjadikan agama sebagai kendaraan meraih supremasi dalam kontestasi politik maka agama menjadi terdegradasi ke titik yang rendah karena agama dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi suatu aliran atau pilihan politik. Masyarakat yang semula berdiam di kawasan perkotaan kemudian dengan alasan-alasan tertentu memilih pindah tempat tinggal ke daerah perdesaan, umumnya mereka adalah relatif lebih tinggi wawasan politiknya dan perilaku itu mereka bawa ketika berinteraksi dengan kelompok pemukim lama di perdesaan. Dalam posisi yang seperti itulah baik pemukim baru maupun pemukim lama memasuki suatu suasana baru yaitu lahirnya berbagai perilaku baru (*novum habitus*) yang seharusnya terjadi proses adaptasi, akomodasi dan seleksi di antara mereka.

Dalam pada itulah, masyarakat hendaknya dituntun untuk memasuki suasana baru yaitu mendorong mereka untuk memiliki perilaku baru agar kehidupan di antara mereka menjadi masyarakat yang terintegrasi sekalipun perbedaan masih tetap diberikan peluangnya sesuai dengan semboyan *bhinneka tunggal ika*. Manakala pola interaksi ini berlangsung tanpa didahului oleh perencanaan dari pemerintahan maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya gesekan sosial yang kemudian berubah menjadi konflik sosial. Berdasarkan uraian di atas maka dipandang perlu untuk melakukan penelitian terhadap

pola relasi antara pemukim baru dengan pemukim lama di sekitar wilayah ibukota Jakarta. Melalui penelitian ini diharapkan akan ditemukan model perubahan sosial menuju modernisasi pembangunan khususnya kawasan pinggiran Jakarta dan sedikit atau banyak memiliki persamaan dengan terjadinya pertumbuhan serta perluasan kota-kota besar di Indonesia. Maka dalam rangka itu, sejak dini dapat diantisipasi guna menghindari dampak negatif yaitu konflik antar umat dan intern umat beragama. Dan selanjutnya dapat dirumuskan strategi pembangunan integrasi kehidupan masyarakat pendatang dengan pemukim lama dalam berbagai bentuk kerja sama budaya dan keberagamaan.

Permasalahan Ruralisasi

Perluasan program pembangunan akan menjangkau seluruh komponen bangsa baik yang berada di perkotaan maupun perdesaan. Hal itu akan berdampak terjadinya mobilitas sosial yang kemudian akan mempengaruhi peta budaya masyarakat. Bentuk perubahan itu adalah pelebaran pemukiman masyarakat sejalan dengan pertumbuhan kota-kota baru yang berkembang di seputar Jakarta yang disebut ruralisasi. Mobilitas sosial akan berakibat terjadinya perubahan peta budaya masyarakat termasuk dalam urusan keberagamaan. Peta budaya itu ditandai dengan berkembangnya keragaman dalam wacana keberagamaan termasuk pendirian rumah ibadat, praksis maupun simbol-simbol keagamaan. Pelaku ruralisasi memiliki pola pikir pragmatis bahkan lebih mengandalkan legalitas formal terutama proses mekanisme pendirian rumah ibadat dan upacara keagamaan sehingga masyarakat perdesaan lebih menekankan aspek askriptif. Dilihat dari segi konfigurasi sosial, masyarakat pendatang ke kawasan pemukiman baru di pinggiran

Jakarta umumnya memiliki jarak kesejahteraan sosial dengan penduduk lokal. Masyarakat pendatang relatif memiliki tingkat kesejahteraan sosial dibanding dengan pemukim lama sebagai prestasi yang mereka miliki akibat dari derajat pendidikan serta profesi mereka. Sebaliknya, masyarakat pemukim lama ditandai dengan kesejahteraan yang rendah, tingkat pendidikan rendah dan profesi mereka adalah sebagai petani yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Kehadiran warga pendatang perkotaan ke perdesaan pada umumnya tidak hanya berakibat sekedar perubahan demografis akan tetapi juga sekaligus membawa tradisi budaya maupun agamanya. Hal yang menarik mereka ke perdesaan adalah (1) tingkat kepadatan penduduk yang masih jarang (2) kawasan perdesaan memiliki bentangan alam dengan dominasi pola ruang pertanian, dan (3) adanya nilai-nilai budaya dan norma-norma tertentu sebagai hasil relasi sosial yang panjang antar sesama warga perdesaan atau relasi warga dengan lingkungannya.³ Dalam pada itu, UU No. 26 Tahun 2007 menegaskan keterkaitan pembangunan perkotaan dengan perdesaan dalam wilayah pelayanannya. Keterkaitan wilayah perkotaan dan perdesaan diatur dalam rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten sehingga tidak terpisah antara *urban planning* dan *rural planning* melainkan menuju kepada *urban regional planning* yang dikenal dengan sebutan Jabodetabek.⁴ Dalam rangka pengurangan beban pembangunan di kota besar maka ada anjuran perlunya membangun pusat-pusat pertumbuhan baru (*new growth poles*) dan mempersiapkan

wilayah-wilayah penerima migrasi termasuk ruralisasi karena wilayah perkotaan mengalami keterbatasan menampungnya.⁵

Berbagai praksis keberagamaan yang semula tidak dikenal masyarakat perdesaan tiba-tiba muncul yang kemudian menimbulkan keterkejutan bahkan ketersinggungan masyarakat seperti berdirinya rumah ibadat dengan konstruksi yang baru, praksis keberagamaan, perayaan dan upacara-upacara keagamaan dan lain sebagainya. Apabila tidak dilakukan proses sosialisasi dengan membangun dialog di antara mereka maka perubahan ini akan menimbulkan keterkejutan budaya (*cultural shock*). Hal ini bukan hanya kaitannya dengan relasi antar agama tetapi juga intern satu agama. Sekalipun suatu kelompok masyarakat memiliki kelompok keagamaan yang sama akan tetapi terbuka kemungkinan terjadi perbedaan dalam wacana pemahaman dan tradisi keagamaan. Hal itu misalnya terdapat di kalangan umat Islam. Masyarakat perdesaan yang terbentuk melalui tradisi kehidupan agraris tentu saja memiliki tradisi keberagamaan yang berbeda dengan kultur keberagamaan yang dimiliki masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan cenderung memiliki tradisi yang dibangun melalui semangat paguyuban yang kemudian membentuk solidaritas mekanis. Setiap orang yang berada dalam suatu lingkungan masyarakat agraris perdesaan memiliki sistim ikatan kekerabatan sehingga hubungan di antara mereka berlangsung secara mekanis umpamanya terjadi pesta perkawinan, adanya warga yang meninggal dan lain sebagainya. Tanpa perlu diarahkan, masyarakat dengan

³ Jef Rudianho Saragih, *Perencanaan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 24-25

⁴ Jef Rudianho Saragih, *Perencanaan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*, 24-25

⁵ Rahardjo Adisasmita, *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), 99.

sendirinya secara bersama-sama melibatkan diri dengan peristiwa sosial itu. Demikianlah terbentuk rentetan interaksi sosial yaitu fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosial dan realitas sosial.

Terjadinya berbagai kasus penolakan masuknya tradisi keberagamaan yang baru di pinggiran Jakarta seperti Bogor, Bekasi, Depok dan Karawang menunjukkan frekuensi yang semakin meningkat baik antar agama maupun dalam satu agama. Perbedaan di kalangan masyarakat antar agama mencakup persoalan kerangka dasar teologis serta praksis keberagamaan sedang intra agama adalah perbedaan penafsiran ajaran agama serta praksis keberagamaan. Hal tersebut dapat dipandang sebagai masalah yang akan dapat mengganggu kerukunan umat beragama. Padahal kerukunan beragama pada tingkat lokal akan dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan kerukunan pada tingkat nasional. Hal itu disebabkan karena faktor agama adalah merupakan hal sensitif bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia.

Adanya sensitivitas emosi keberagamaan disebabkan oleh dua klaim setiap umat beragama yaitu klaim kebenaran (*truth claim*) dan klaim keselamatan (*salvation claim*). Oleh karena itu, merupakan suatu hal penting apabila Pemerintah memiliki strategi antisipasi terhadap fenomena ruralisasi di daerah Pinggiran Jakarta yang sedikit-banyak terkait dengan relasi umat beragama. Bertolak dari hal itu maka perlu dirumuskan Format Ideal Hubungan Ruralisasi Dengan Penduduk Lokal guna tetap terpelihara kerukunan hidup umat beragama daerah pinggiran kota Jakarta khususnya di daerah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Karawang. Kasus-kasus aktual kesenjangan hubungan umat beragama sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang belum menunjukkan tanda-

tanda penyelesaian. Gesekan di kalangan umat beragama tidak hanya terjadi dalam kaitan antar agama tetapi juga di dalam satu agama sebagaimana yang terjadi di Bogor ketika sebagian masyarakat merencanakan mendirikan Mesjid Ibn Hanbal. Pendekatan yuridis formal yang dilakukan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi efektif sebagai jalan keluar dari konflik keumatan tersebut. Demikian juga, akibat dari keterbatasannya maka peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) belum efektif dalam merumuskan solusi gesekan sosial di antara umat beragama. Pada berbagai konflik sosial, kasus terlebih dahulu muncul baru disusul oleh tanggapan dari Pemerintah Kabupaten/Kota dan FKUB.

Pendekatan Teoritis

Masyarakat yang pindah dari kota ke desa disebut ruralisasi sebagai kebalikan dari urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa. Ruralisasi pada umumnya banyak dilakukan oleh mereka yang pernah melakukan urbanisasi, namun banyak juga pelaku ruralisasi yang merupakan orang kota asli. Faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya ruralisasi dibedakan menjadi faktor pendorong dan penarik. Faktor pendorong terjadinya ruralisasi adalah (1): kejenuhan tinggal di kota (2) harga lahan di kota semakin mahal sehingga tidak terjangkau (3) keinginan untuk memajukan desa atau daerah asalnya; serta (4) merasa tidak mampu lagi mengikuti dinamika kehidupan di kota.

Sedang faktor penarik terjadinya ruralisasi adalah (1) harga lahan di pedesaan relatif masih murah (2) pola kehidupan masyarakatnya lebih sederhana (3) suasana lebih tenang sehingga cocok untuk penduduk usia tua dalam menjalani masa pensiun, serta (4) adanya perasaan keterkaitan dengan daerah

asal atau kenangan masa kecil. Adapun bentuk pemukiman penduduk yang mengalami ruralisasi dapat dikelompokkan kepada dua macam yaitu masyarakat yang menyatu baik pemukiman maupun budaya dengan masyarakat lokal dan masyarakat yang mengambil jarak dengan penduduk lokal karena tingkat ekonomi, pendidikan dan budaya yang masih terbawa pola masyarakat urban karena mereka tinggal di kompleks-kompleks perumahan. Persoalan yang sering terjadi pada masyarakat rural yaitu yang berupaya memindahkan kultur kehidupan masyarakat urban kepada kultur lokal. Masyarakat urban tipe kedua ini pada umumnya adalah memiliki tradisi budaya maupun agama yang berbeda dari masyarakat desa. Oleh karena mereka bermukim di dalam wilayah pemukiman yang membentuk *enclave* tersendiri sehingga mereka merasa tidak berkewajiban melakukan dialog untuk membangun komunikasi kepada komunitas lokal ketika hendak mendirikan rumah ibadat serta tradisi keagamaan. Pada saat itulah terbuka kemungkinan terjadinya konflik dengan penduduk lokal.

Pada daerah yang telah lama melakukan proses akulturasi budaya maka hampir tidak terjadi konflik sosial oleh karena masing-masing baik secara rekayasa maupun alamiah telah terjadi proses adaptasi antara satu kelompok dengan yang lain. Dalam penelitian yang dilakukan FISIP Universitas Airlangga di Surabaya menunjukkan kenyataan yang menarik ketika menggambarkan terjadinya relasi sosial di Surabaya antara penduduk Cina, Madura dan Jawa. Dalam penelitian tersebut digambarkan adanya tiga faktor sosial yang berperan mengeliminasi perbedaan antar etnis

tidak meruncing menjadi gesekan sosial yaitu simbiosis-mutualisme; adanya forum sebagai zona netral yang mempertemukan kepentingan para pihak, dan adanya dukungan serta *sense of belonging* dari tokoh masyarakat dan agama serta lembaga sosial yang mencegah kemungkinan terjadinya konflik horizontal.⁶

Dalam setiap interaksi dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat empat aspek yang perlu diketahui yaitu fakta sosial, tindakan sosial, khayalan sosial dan realitas sosial. Fakta Sosial sebagai cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang berada di luar individu dan mempunyai kekuatan memaksa dan mengendalikan individu tersebut. Pada masyarakat yang percaya terhadap keabsolutan ajaran agama tertentu akan membentengi diri dengan berbagai identitas sosial melalui kepemimpinan pemuka agama dan memandang umat lain sebagai umat sesat yang tidak patut dikasihani. Oleh karena itu, sikap rukun terhadap umat lain adalah perbuatan menyalahi keabsolutan ajaran agama yang dianut. Dari contoh tersebut bisa dilihat adanya cara bertindak, berpikir, dan berperasaan yang ada di luar individu yang bersifat memaksa dan mengendalikan individu penganut agama. Kajian terhadap kelompok ini diperlukan untuk memahami terjadinya perubahan pada umat beragama yang terbentuk melalui pemahaman terhadap ajaran agama yang dianutnya dan agama orang lain

Tindakan sosial yaitu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Contoh dengan memotong hewan korban secara diam-diam karena kesenangan pribadi untuk menuju rida Allah tidak termasuk dalam kajian sosiologi akan tetapi ketika pelaksanaan pemotongan hewan

⁶ Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi, Teks Pengantar*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 204-205

korban dilakukan secara bersama dengan mengorganisirnya melalui pembagian tugas di antara panitia serta masyarakat yang membutuhkan daging korban maka hal itu menjadi obyek kajian sosiologi. Demikian juga halnya perubahan tindakan sosial yang terjadi menjelang keberangkatan serta penyelenggaraan ibadah haji yang semula dalam lingkup yang terbatas namun sekarang telah menjadi bagian dari kebijakan negara. Khayalan sosiologis sebagai cara untuk memahami apa yang terjadi di masyarakat maupun yang ada dalam diri manusia. Melalui khayalan sosiologi, kita mampu memahami sejarah masyarakat, riwayat hidup pribadi, dan hubungan antara keduanya. Alat untuk melakukan khayalan sosiologis adalah permasalahan (*troubles*) dan isu (*issues*). Konflik yang terjadi di Ambon pada beberapa tahun yang lalu menjadi obyek khayalan sosiologis yang faktor-faktornya bermula dari potensi konflik, pemekaran konflik, pelembagaan konflik, penakaran konflik dan berakhir dengan ledakan konflik. Dalam kaitan ini kelihatan betapa permasalahan pribadi individu merupakan ancaman terhadap nilai-nilai pribadi karena ide terjadinya konflik pada mulanya berasal dari individu yang resah terhadap kehidupan masyarakat yang rukun kemudian terbentuk opini pertentangan antara satu kelompok agama dengan kelompok lainnya. Faktor pemicunya bukan hanya berasal dari persepsi perbedaan agama akan tetapi bisa muncul karena perbedaan jarak sosial antara penduduk asli dengan pendatang sementara kehidupan pendatang lebih sejahtera dari lainnya.

Realitas Sosial adalah pengungkapan tabir yang semula sifatnya merupakan misteri namun kemudian berubah menjadi suatu realitas yang tidak terduga. Sosiolog dengan mengikuti aturan-aturan ilmiah melakukan

pembuktian secara ilmiah dan objektif dengan pengendalian prasangka pribadi, dan pengamatan tabir secara jeli serta menghindari penilaian normatif. Sebagai contoh proses transformasi sosial dari masyarakat agraris menjadi masyarakat urban. Pada dasarnya asumsi masyarakat agraris adalah mereka yang relatif taat terhadap tradisi termasuk agama dengan semua pranata sosialnya. Kemudian masyarakat urban adalah dikhayalkan sebagai masyarakat yang permisif terhadap nilai-nilai moral. Akan tetapi fakta menunjukkan bahwa modernitas menunjukkan realitas sosial yang menyimpang yaitu terjadinya kesemaran baru pengamalan ajaran agama di kalangan kelas menengah-atas perkotaan sebagai wujud kerinduan terhadap nilai-nilai spiritualitas yang baru.

Bangsa Indonesia, telah ditakdirkan sebagai bangsa yang memiliki kemajemukan budaya termasuk agama yang sangat tinggi. Hampir tidak ada bangsa di dunia yang memiliki keragaman seperti Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia bukan hanya karena keragaman masyarakatnya akan tetapi juga sebagai negara kepulauan memiliki perbedaan etnis, ras, budaya maupun agama. Dalam kemajemukan itu terjadi etnisitas dan religiositas saling beririsan yang melahirkan tumpang tindih antara etnisitas dan keberagaman (*religious affinity*). Dengan mengutip Rita Smith Kipp dalam *Dissociated Identities: Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian Society*, Bahrul Hayat mengatakan bahwa kondisi tersebut bisa menjadi kekuatan yang potensial terwujudnya keserasian sosial yang disebut kekuatan pluralisme apabila di

dalamnya terkandung nilai-nilai (*cultural and pluralism as value*).⁷

Tetapi sebaliknya, kemajemukan tersebut menyimpan sejumlah potensi kompetisi antar kelompok yang kemudian melahirkan konflik. Karena itu, sebagai upaya membangun keserasian sosial, tentulah harus bisa diwujudkan berbagai kerja sama di antara masyarakat pendatang dan pemukim lokal. Terjadinya integrasi sosial antara warga ruralisasi dengan penduduk lokal didukung oleh aktifnya sistem yang disebut modal sosial (*social capital*) yang ditandai adanya kesediaan para individu berbagi (*sharing*) nilai dan norma yang disepakati bersama sehingga para individu kelompok ruralisasi maupun penduduk lokal diikat oleh rasa saling percaya (*mutual trust*).⁸

Secara teoritis, sekalipun umat beragama berbeda dalam kelas sosial akan tetapi juga bersikap inklusif karena mereka memiliki nilai tertinggi kehidupan yaitu kebenaran absolut (*ultimate reality*). Namun, sekalipun sifat dasar keberagamaan adalah inklusif tetapi apabila tidak diimbangi frekuensi dan intensitas interaksional antarkelompok akan menyebabkan berkembangnya perilaku yang cenderung *introvert*, menutup diri dan acuh tak acuh terhadap lingkungan. Akibatnya, diri atau kelompoknya merasa tidak diterima oleh kelompok lain. Perilaku demikian dipertajam lagi dengan pemaknaan agama yang cenderung konfrontatif dan rendahnya saling keterkaitan emosional.⁹

Konsep persatuan bangsa dalam semangat kerukunan adalah membiarkan

mereka dalam keragaman namun bersatu dalam tujuan sesuai dengan format kehidupan berbangsa dan bernegara yang tersimpul dalam semboyan *bhinneka tunggal ika*. Hal itu berarti bahwa kerukunan bukan dimaksudkan setiap orang harus melartutkan diri pada budaya dan agama yang sama. Setiap orang terbuka untuk memiliki pengakuan absolut terhadap klaim kebenaran dan keselamatan ajaran agamanya serta kebebasan mengekspresikan budaya masing-masing tetapi pada saat yang sama juga mengakui serta menghormati keberadaan budaya orang lain. Dalam pada itulah, setiap warga masyarakat memiliki semangat saling belajar terhadap pengalaman keberagaman masing-masing.¹⁰

Terjadinya mobilitas sosial yang disebut ruralisasi tidak sekedar terjadinya perpindahan jumlah penduduk akan tetapi bisa memunculkan berbagai rupa konsekuensi. Bagi masyarakat modern yang memiliki ikatan yang dengan modernitas tentu akan cenderung mengabaikan nilai-nilai spiritualitas karena yang berkuasa secara faktual adalah kekuatan materi. Apabila wawasan keberagamaan yang *artificial* tersebut mereka kembangkan di pemukiman baru tentulah akan menimbulkan reaksi dari masyarakat pemukim lama yang sudah memiliki tradisi keyakinan yang lama. Manakala sikap pemukim yang baru tersebut terobsesi dengan motivasi pengembangan misionaris keagamaan maka mereka lebih mengejar pertumbuhan populasi umat dan sekaligus menekankan simbol keberagamaan seperti upacara keagamaan dan pengembangan komunitas jumlah penganut. Dan hal ini tentu pula menimbulkan reaksi di kalangan

⁷ Bahrul Hayat, *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, (Jakarta: PT Saadah Cipta Mandiri, 2012), 4.

⁸ Bambang Rudito dan Melia Famiola, *Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial*, (Bandung: Rekayasa Sains, 2008), 57.

⁹ Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 220.

¹⁰ Bagong Suyanto dan Sudarso, "Diferensiasi Sosial", 204-206

pemukim lama yang sudah memiliki tradisi keberagaman yang sudah mapan. Dengan terjadinya pengembangan misi penyiaran agama sekaligus rencana pendirian bangunan rumah ibadat yang tidak didahului dengan pendekatan secara persuasif cenderung akan terbuka ruang konflik dengan pemukim yang lama.

Cara pandang ini yang cenderung nihilistik yaitu pola kehidupan modern yang tidak mengakui adanya nilai absolut di luar diri manusia dan pemahaman keagamaan yang simbolik akan berbenturan dengan sikap masyarakat perdesaan sebagai masyarakat homogen yang selalu mengaitkan nilai tradisi budaya mereka dengan keberagaman. Berkaitan dengan kegiatan penyiaran agama dan pendirian bangunan rumah ibadat telah dilakukan pengaturan oleh pemerintah dengan merumuskan semacam kode etik penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat. Aturan tentang hal itu telah dituangkan melalui SKB Menag dan Mendagri No.1/BER/MDN-MAG/1979. Aturan tentang pendirian rumah ibadat telah dirumuskan secara bersama oleh wakil majelis-majelis agama yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang tata cara Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat. Namun, oleh karena baik SKB maupun PBM tersebut hanya berstatus peraturan pada tingkat menteri maka keduanya hanya mengandalkan sanksi moral bagi para pelanggar aturan tersebut. Oleh karena itulah, pada tahap

implementasi masih menghadapi sejumlah kendala. Sementara sebagian warga masyarakat berpandangan bahwa adanya Peraturan Bersama ini justru mempersulit kegiatan pendirian rumah ibadat.¹¹

Berangkat dari dilema di atas, yaitu proses ruralisasi yang melahirkan sikap ofensif pemukim baru dan sikap bertahan pemukim lokal, maka diperlukan kesediaan para pihak untuk membangun sikap toleransi dalam batas-batas yang tidak melanggar ajaran pokok agama-agama yang kemudian diharapkan melahirkan kesepakatan terhadap norma-norma universal etika keberagaman.¹² Maka dalam rangka itu diperlukan kemampuan untuk mempertahankan disiplin warga dengan membangun disiplin etik dan keagamaan yang ketat sebagai upaya memelihara kerukunan umat beragama di tengah pengaruh modernitas. Secara teoritis, adanya masalah-masalah sosial dapat ditelusuri dari berbagai aspek yaitu mendalami perkembangan sosial guna mengetahui arah tertentu karena keadaan sistem tidak terulang lagi pada setiap tingkatan; bangunan sistem sosial yang mencerminkan tingkat lebih tinggi dari semula; dan, perkembangan ini hendaknya juga dipicu oleh kecenderungan yang berasal dari dalam sistem seperti pengaruh urbanisasi terhadap peningkatan religiositas. Selanjutnya Interaksi sosial ini akan melahirkan pola peredaran sosial yaitu proses sosial yang tidak mengarah kepada perkembangan tertentu tetapi juga tidak berkembang secara serampangan. Cirinya dapat dilihat pada dua hal (1) mengikuti pola edaran yaitu keadaan sistem pada waktu tertentu kemungkinan besar muncul kembali pada waktu mendatang dan merupakan replika dari yang terjadi pada masa

¹¹ D.E Lindstrom, *American Rural Life*, (New York: The Ronald Press Company, 1948), 229-230.

¹² Elizabeth K. Nottingham, *Agama Dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 146

lalu (2) perulangan ini disebabkan kecenderungan permanen di dalam sistem karena sifatnya yang bergerak ke sana ke mari. Terakhir adalah kemajuan sosial (*sosial progress*) yang memberikan kategori terhadap perubahan sosial lebih obyektif, netral terhadap aspek kehidupan normatif. Pengertian kemajuan sosial adalah mencakup (1) proses menjurus kepada kondisi yang diharapkan (2) sistem sosial terus menerus mendekati keadaan yang lebih baik atau lebih menguntungkan berdasarkan pertimbangan etika seperti keadilan, kebahagiaan, kebebasan, kesejahteraan atau kepada masyarakat utopia sebagai masyarakat ideal

Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, wawancara, studi dokumen dan triangulasi, analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹³ Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif disebut juga penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Disebut juga metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya dan disebut juga metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.¹⁴ Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik proses pengumpulan data melalui observasi,

wawancara, studi dokumen dan kemudian dipadukan dengan triangulasi.

Observasi adalah sebagai alat bagi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sanafiah Faisal mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berpartisipasi (*participant observation*), observasi yang terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*) dan observasi yang tidak berstruktur (*unstructured observation*). Sedang Sparedley dalam Susan Stainback menggambarkan observasi menjadi empat yaitu *passive observation*, *moderate participation*, *active participation* dan *complete participation*.¹⁵ Dalam penelitian ini, digunakan observasi dalam model *moderate participation* dengan alasan peneliti akan dapat memerankan diri sebagai peneliti, yang berupaya membantu merumuskan cara yang lebih moderat dalam melihat hubungan antara dua kelompok yang saling berseberangan. Observasi dengan melakukan pengamatan terhadap pola relasi hubungan masyarakat ruralisme dengan penduduk lokal dalam berbagai kegiatan sosial, perkawinan, kematian, rembuk desa. Demikian juga pengamatan apakah di lokasi penelitian terjadi konflik tentang pendirian rumah ibadat dan kegiatan ritual-ritual keagamaan dan bagaimana cara masyarakat membangun ekuilibrium dalam berbagai hubungan sosial tersebut.

Observasi dilakukan, sesuai pendapat Spradely, pada situasi sosial yang terdiri dari tiga komponen yaitu *place* (tempat) dengan mengamati tempat interaksi berlangsung, *actor* (pelaku) dengan mengamati orang-orang yang memainkan peran tertentu dan *activities*

¹³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 1.

¹⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 1.

¹⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 64.

(aktivitas) yaitu kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung.¹⁶ Observasi kemudian dilanjutkan dengan melakukan sejumlah wawancara kepada warga masyarakat baik yang melakukan ruralisasi maupun penduduk yang menjadi pemukim lama. Selain dari itu, pendalaman terhadap informasi yang diperoleh melalui pertemuan dengan dua kelompok warga, juga dikembangkan wawancara dengan pejabat pemerintahan setempat termasuk juga wawancara dilakukan kepada pemuka agama, budaya dan yang dipandang sebagai cendekiawan masyarakat. Obyek penelitian adalah warga masyarakat baik yang melakukan program ruralisasi maupun pemukim lama yang ke semuanya bertempat tinggal pada kabupaten/Kota di sekitar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yaitu Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang. Kemudian, wawancara dilakukan terstruktur sebagai teknik pengumpulan data sesuai dengan panduan wawancara yang sudah disusun dan dibahas secara mendalam oleh Tim Peneliti bersama dengan petugas penelitian lapangan.

Pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dalam penelitian ini dibantu oleh Tim Pewawancara dari Mahasiswa Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah yang telah memperoleh perkuliahan Sosiologi sehingga kegiatan pengumpulan data ini juga merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi mereka. Dengan wawancara terstruktur, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan pengumpul data tinggal mencatatnya. Jenis pertanyaan dalam wawancara diarahkan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman, pendapat, perasaan,

pengetahuan, indra dan pertanyaan yang berkenaan dengan latar belakang atau demografi. Informasi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara ini kemudian dibandingkan dengan dokumen jika ditemukan data dokumen pada masing-masing lokasi penelitian.

Kemudian, metode penelitian yang akan digunakan adalah triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data guna mendapatkan data dari sumber yang sama. Metode triangulasi sekaligus juga dimaksudkan untuk menguji kredibilitas data melalui teknik yang berbeda-beda. Dengan demikian, tujuan penelitian kualitatif ini bukan semata-mata mencari kebenaran akan tetapi lebih ditekankan kepada pemahaman subyek terhadap dunia sekitarnya.¹⁷ Setelah data terkumpul maka proses berikutnya adalah analisis data yang diarahkan kepada menjawab 5 (lima) rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Langkah ketiga setelah pengumpulan data maka dilakukan analisis data yang kemudian menarik lima simpulan sesuai dengan tujuan penelitian. Simpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan deskripsi atau gambaran tentang suatu obyek yang diteliti yang sebelumnya masih kabur kemudian menjadi terang baik bentuk obyek, faktor penyebabnya, langkah lanjutan yang harus diambil oleh para pengambil kebijakan. Hal inilah kemudian yang menjadi jawaban terhadap rumusan masalah dan selanjutnya pengambil kebijakan berperan untuk menindaklanjutinya. Dengan ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan kompetensi maka selanjutnya akan dapat tersusun konstruksi bangunan

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 68.

¹⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 85

format ideal pola hubungan pemukim berdasar ruralisme dengan penduduk lokal sehingga terwujud kerukunan hidup umat beragama di daerah pinggiran di Jakarta.

Simpulan

Faktor yang mendorong masyarakat melakukan ruralisasi ke daerah pinggiran Jakarta adalah didasarkan kepada tiga aspek yaitu faktor pendorong (*push factor*) dari daerah asal, faktor penarik (*pull factor*) dari daerah tujuan, dan faktor lainnya (*other factor*). Sulitnya mempertahankan kehidupan di daerah asal, tingginya biaya hidup serta kondisi lingkungan yang kurang ramah menjadi faktor pendorong (*push factor*). Selanjutnya faktor penarik adalah suasana lingkungan yang asri, tenang, tenteram dan semangat guyub menjadi daya penarik dari lokasi baru. Sedang faktor lainnya adalah karena keinginan untuk meningkatkan ketahanan hidup dalam menghadapi berbagai perubahan sosial.

Pengaruh aktual ruralisasi adalah terjadinya interaksi di antara penduduk yang memiliki dua latar belakang kultur yang berbeda. Manakala masyarakat memiliki kemampuan untuk mengatasi perbedaan itu maka dengan sendirinya mereka hidup dalam suasana integratif yang asosiatif. Sebaliknya, manakala masyarakat pendatang maupun perkampungan setempat tidak mampu membangun integrasi di antara mereka maka dengan sendirinya suasana hubungan sosial adalah disintegratif yang disosiatif.

Berbagai kasus aktual terjadinya konflik di antara dua kelompok masyarakat tersebut berkaitan dengan semangat keberagaman khususnya terkait dengan penyiaran agama dan pendirian rumah ibadat serta adanya tradisi sebagian pendatang terutama di kalangan komunitas perumahan yang memelihara

hewan berkaki empat. Sementara masyarakat setempat yang umumnya menganut Mazhab Syafi'i memandang hewan berkaki empat khususnya anjing dan babi adalah najis berat (*mughallazah*). Sementara itu, dalam hubungan intern umat beragama maka kasus yang banyak terjadi khususnya di kalangan umat Islam baik adalah perbedaan budaya maupun aliran pemahaman keagamaan. Kasus intern umat Islam yang paling menonjol adalah keberadaan warga Ahmadiyah di Cipondoh Tangerang. Pada mulanya, kehadiran kelompok Ahmadiyah ditentang masyarakat akan tetapi karena di antara mereka adalah masih ada ikatan kekerabatan maka secara lambat laun, masyarakat seakan bersikap permisif terhadap Ahmadiyah.

Strategi penyelesaian yang dilakukan Pemerintah terhadap perubahan konfigurasi kependudukan ini belum ada secara konsepsional. Aparat pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dari masing-masing kelompok sosial untuk membangun kehidupan yang integratif. Di samping itu, keberadaan forum kerukunan semacam FKUB, dan FPK kurang dirasakan warga kehadirannya di lapisan massa akibat dari berbagai persoalan yang dialami FKUB baik dukungan finansial maupun wawasan pemahaman terhadap makna kerukunan. Oleh karena itu, mereka membentuk wadah kerukunan pada tingkat lokal seperti MUB di Bekasi.

Pemerintah belum memiliki strategi dalam menyelesaikan berbagai potensi konflik kecuali sekedar himbauan secara sepintas yang disampaikan ketika dilangsungkan pertemuan sosialisasi program tertentu dari pemerintah. Pada akhirnya diharapkan kesediaan masyarakat yang melakukan ruralisasi maupun warga perkampungan untuk membangun secara proaktif solidaritas ketika muncul

ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Kekuatan yang dapat menghidupkan solidaritas sosial adalah adanya persilangan afiliasi (*cross-cutting affiliations*) dan persilangan kelembagaan (*cross-cutting institutions*). Hal itu dapat terwujud manakala di antara dua kelompok warga terbina rasa saling percaya (*mutual trust*) satu dengan lainnya melalui berbagai jalur kerja sama baik yang terencana maupun kegiatan secara spontanitas dari warga. Oleh karena itu hendaknya dapat diciptakan kondisi saling menguntungkan (*mutual-symbiosis*), zona netral dan pranata yang mengarah terwujudnya kerukunan.

Saran

Format ideal hubungan ruralisasi dengan penduduk lokal dapat terbentuk melalui suasana saling memahami dan bersedia berbagi kemampuan dan pengetahuan sehingga jarak sosial akan semakin dekat. Kedekatan hubungan tersebut menjadi semacam modal sosial (*social capital*) sehingga memperpendek jarak sosial. Hal ini diharapkan akan terwujud manakala pemerintahan melakukan rekayasa intervensi untuk menghindarkan masyarakat tidak terjebak dalam sindrom pembangunan yaitu kemiskinan dan *inertia* yaitu manusia yang bersikap pasrah (*fix mindset*) dan kelembanan dalam berkreasi. Allah telah menganugerahkan potensi kemauan (*masyi-ah*) dan kemampuan (*istitha'ah*) karena itu tidak ada alasan lagi untuk bersikap pasrah dan lamban di dalam melakukan kegiatan. Dengan dua potensi kemauan dan kemampuan, setiap warga memiliki pola berpikir yang tumbuh (*growth mindset*) sebagai lawan dari perangkat berpikir yang baku (*fix mindset*).

Persoalan penting dalam proses ruralisasi di kawasan pinggiran Jakarta adalah

ancaman terhadap kerukunan umat beragama akibat kehadiran warga ruralisasi yang sukar menyatu dengan penduduk lokal. Demikian juga sikap para pemukim lama yang selalu menaruh curiga kepada penduduk pendatang. Kearifan lokal yang selama ini diharapkan sebagai perekat sosial ternyata kurang ampuh karena kearifan lokal lahir dari budaya agraris sedang masyarakat di kawasan pinggiran Jakarta sedang bergerak menjadi masyarakat industri dengan sendirinya solidaritas mekanik akan tergeser oleh solidaritas organik.

Pustaka Acuan

- Adisasmita, Rahardjo. *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014
- Ariyani, Nur Indah. "Strategi Adaptasi Orang Minang Terhadap Bahasa, Makanan, dan Norma Masyarakat Jawa", dalam *Jurnal Komunitas* Vol. 5 No. 1, Maret 2013
- BPS Kota Tangerang, *Kecamatan Cipondoh dalam Angka, 2017*
- Cross, Frank B. *Constitutions and Religious Freedom*, Co0mparative Constitutional Law and Policy, Cambridge University Press, 2015
- Dobb, Christoper Bates. *The Sociology: An Introduction*, New York, CBS Colleg, 1985
- Haryano, Joko Tri. "Kearifan Lokal Pendukung Kerukunan Beragama Pada Komunitas Tengger Malang Jatim", dalam *Jurnal Analisa* Vol. 21 No. 02, Desember 2014
- Hayat, Bahrul *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*, Jakarta, PT Saadah Cipta Mandiri, 2012
- Idianto, M. *Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2005
- Kemenag RI, *Komplikasi Kebijakan Dan Peraturan Perundang-undangan*

- Kerukunan Umat Beragama*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang Dan Diklat, 2012
- Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Efektivitas FKUB dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama: Kapasitas Kelembagaan dan Efisiensi Kinerja FKUB terhadap Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2015
- Lindstrom, D.E. *American Rural Life*, New York, The Ronald Press Company, 1948
- Lubis, M Ridwan. *Merawat Kerukunan, Pengalaman Indonesia*, Jakarta, UIN Press, 2017
- , *Agama Dan Perdamaian*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2017
- , *Kerukunan Beragama Dalam Cita Dan Fakta*, PKUB Kemenag, 2016
- , *Sosiologi Agama, Memahami Perkembangan Agama Dalam Interaksi Sosial*,
- , *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan Di Indonesia*, PKUB Kemenag, 2017
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama Dan Masyarakat, Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Purwasito, Andrik. *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Ropi, Ismatu. *Religion And Regulation in Indonesia*, Palgrave, MacMillan, Singapore, 2017.
- Rudito, Bambang. dan Melia Famiola, *Social Mapping, Metode Pemetaan Sosial*, Bandung, Rekayasa Sains, 2008
- Saefuddin, Achmad Fedyani. *Konflik dan Integrasi Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Jakarta: CV Rajawali, 1986
- , *Agama Dalam Perbincangan Sosiologi*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010
- Saragih, Jef Rudianho. *Perencanaan Wilayah Dan Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Pertanian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- Sibarani, Robert. *Kearifan Lokal, Hakikat, Peran Dan Metode Tradisi Lisan*, Jakarta, Asosiasi Tradisi Lisan, 2012.
- Silalahi, Ulber. "Rekonsiliasi Sosial: Satu Kerangka Analisis dari Teori Konsensus", *Jurnal Administrasi Publik* Vol. 5, No. 2, 2008
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pres, 2012
- Sosialisasi PBM & Tanya Jawabnya*, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2009
- Suyanto, Bagong. dan Sudarso, "Diferensiasi Sosial" dalam J Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (ed.), *Sosiologi, Teks Pengantar*, Jakarta, Prenada Media Group, 2006
- Sweet, William et.al., *The Dialogue of Cultural Traditions: A Global Perspective*, The Council for Research in Values and Philosophy, Washington DC, 2008.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012